

# Efektivitas Perencanaan: Menilai Kapasitas Perencanaan Penanganan Jalan Kabupaten di Kabupaten Pacitan Dalam Mendukung Pengembangan Wilayah

Arfin Fuad, Yori Herwangi

Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada,  
[arfin.fuad@mail.ugm.ac.id](mailto:arfin.fuad@mail.ugm.ac.id)

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Diterima: 07-07-2020

Disetujui: 19-08-2020

### Kata Kunci:

Efektivitas  
Kapasitas  
Perencanaan  
Pengembangan  
Wilayah  
Jalan Kabupaten

## ABSTRAK

**Abstrak:** Perencanaan pembangunan khususnya pada penanganan jalan kabupaten tidak bisa lepas dari keterkaitan wilayah dalam perencanaannya. Dengan melihat wilayah secara utuh maka program pembangunan yang akan direncanakan akan lebih terarah dan tepat dalam penanganannya dan mendorong pengembangan wilayah yang berimplikasi untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengukur tingkat kapasitas perencanaan pada proses perencanaan program penanganan jalan kabupaten yang telah dilaksanakan dalam mendukung pengembangan wilayah di Kabupaten Pacitan. Efektivitas perencanaan yang dilakukan akan berpengaruh juga terhadap perencanaan yang dihasilkan terutama dilihat dari kapasitas perencanaan yang dimiliki. Variabel kapasitas perencanaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tujuan program, tinjauan kebijakan, kondisi lingkungan, kepemimpinan, sumber daya finansial, struktur organisasi, pemahaman perencanaan dan latar belakang pendidikan, koordinasi dan komunikasi, serta teknologi. Hasil penilaian kapasitas perencanaan menunjukkan hasil 83% atau kapasitas tinggi. Kekurangan terletak pada variabel kepemimpinan, sumberdaya finansial dan teknologi yang harus terus dikembangkan yang memiliki nilai 60% atau kapasitas sedang. Variabel yang masih harus ditingkatkan meskipun masuk dalam kategori tinggi dengan nilai 86,7% yaitu struktur organisasi, pemahaman perencanaan dan latar belakang pendidikan, serta koordinasi dan komunikasi dalam perencanaan yang perlu menjadi perhatian Kabupaten Pacitan.

**Abstract:** *Development planning, especially in district road planning, cannot be separated from the interrelation of the region in its planning. By looking at the area as a whole, the development program to be approved is more directed and appropriate in its management and encourages regional development that has implications for the welfare of the community. This study aims to measure the level of planning capacity in the district road management program planning process that has implemented in support of regional development in Pacitan Regency. The effectiveness of the planning carried out will also affect the resulting planning is mostly seen from the planning capacity possessed. Planning capacity variables used in this study are program objectives, policy determination, environmental conditions, leadership, financial resources, organizational structure, understanding of planning and educational background, coordination and communication, and technology. Results Estimated capacity planning results in 83% or high capacity. The weakness lies in the leadership variables, financial resources and technology that must continuously develop, which have a value of 60% or medium power. Variables that still need to be improved when included in the high category with a value of 86.7% are the organizational structure, understanding of planning and educational background, and coordination and communication in planning that need to be a concern of Pacitan Regency.*

## A. LATAR BELAKANG

Pada konsep pengembangan wilayah yang sudah ada, dikembangkan berdasarkan dari kebutuhan suatu daerah untuk meningkatkan fungsi dan peran wilayah serta potensinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam wilayah tersebut atau wilayah sekitarnya. Sesuai dengan perkembangan saat ini, konsep dari pembangunan wilayah tidak hanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan sektoral atau parsial saja, tetapi juga dilaksanakan untuk memenuhi

tujuan dari pengembangan wilayah yang bersifat komprehensif dan holistik dengan tidak lepas dari pertimbangan keserasian antara berbagai sumberdaya yang membentuk wilayah yang didukung oleh sistem hukum dan kelembagaan yang mencakupnya [1].

Menurut Walter Cristaller dalam [2] mengenai teori tempat sentral tentang pengembangan wilayah dimana berdasarkan teori tersebut terdapat tiga unsur fundamental pengembangan wilayah, yaitu (a) adanya pusat, (b) wilayah pengaruh dan (c) tersedianya jaringan transportasi. Tiga unsur fundamental tersebut terkait

erat satu dengan yang lain, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, ketiganya membentuk suatu kesatuan pelayanan pengembangan wilayah. Dimensi wilayah merupakan suatu hal yang penting dan merupakan suatu faktor yang perlu dipertimbangkan secara mendalam dalam melakukan analisis dan penentuan lokasi dimana program atau proyek dalam perencanaan pembangunan harus diletakkan [3].

Inventarisasi prasarana wilayah dan penyusunan perencanaan infrastruktur terutama pada jaringan jalan sampai saat ini masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi secara spasial. Kementerian PPN/BAPPENAS, mengenalkan pendekatan yang digunakan dalam melakukan perencanaan terutama dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial atau yang disingkat pendekatan perencanaan THIS. Perencanaan ini bisa diijelaskan bahwa, tematik, holistik, integratif dan spasial merupakan penjabaran tema prioritas pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Infrastruktur jalan merupakan salah satu utilitas penting dan strategis pendukung suatu kawasan dalam wilayah, dimana infrastruktur jalan merupakan penyusun dari struktur kawasan tersebut. Untuk melakukan pengembangan wilayah dengan infrastruktur jalan sebagai motor penggerak yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat perekonomian suatu wilayah, maka strategi dalam penanganan infrastruktur jalan ini khususnya jalan kabupaten harus memperhatikan potensi-potensi yang ada pada suatu wilayah. Tidak hanya memberikan gambaran kondisi fisik saja, tetapi juga harus dapat memberikan informasi-informasi baik berupa permasalahan maupun peluang atau potensi yang berhubungan dengan lingkungan, sosial, ekonomi dan masyarakat sehingga informasi yang disampaikan terintegrasi dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam merumuskan perencanaan dan investasi pembangunan jalan berbasis potensi wilayah secara menyeluruh.

Dengan banyaknya ruas jalan yang harus ditangani pemerintah daerah, maka akan sangat diperlukan penentuan skala prioritas penanganan ruas jalan supaya dalam mengalokasikan dana yang terbatas menjadi efektif dan efisien penggunaannya, serta bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah [4]. Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan yang tepat sasaran sesuai dengan tujuannya yaitu mampu meningkatkan perekonomian wilayah dan kesejahteraan masyarakat tentunya akan dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan dalam melaksanakan perencanaan lokasi penanganannya, sehingga diperlukan perencanaan yang baik dan tepat terhadap penempatan lokasi penanganan jalannya.

Keterbatasan anggaran dan tingkat kebutuhan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan juga untuk pengembangan wilayah perlu dilakukan suatu kajian. Dalam penanganan jaringan jalan kabupaten yang notabene merupakan fasilitas dasar infrastruktur, membutuhkan perumusan yang tepat dalam perencanaannya untuk diimplementasikan sehingga sesuai dengan tujuan dalam pelaksanaan

program tersebut terutama dalam hal mendukung pengembangan wilayah. Mengevaluasi suatu program akan dapat memberikan masukan dalam melihat bagaimana program yang ada tersebut direncanakan sampai implementasinya apakah telah sesuai dengan tujuan pemerintah daerah yaitu untuk mengembangkan wilayah yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi pada tahap perencanaan masih sering diabaikan oleh pemerintah daerah sendiri dan juga masih sedikit penelitian yang mengangkat permasalahan dari sisi perencanaan. Penilaian efektivitas perencanaan yang dilakukan dilihat dari sisi kapasitas perencanaannya akan dapat memberikan gambaran secara rinci terkait pada setiap atribut atau variabel penilaian. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh [5] yaitu efektivitas dalam perencanaan adalah bahwa perencanaan merupakan suatu proses dalam menghasilkan rencana, sehingga efektivitas perencanaan didasarkan pada karakteristik pada proses perencanaan itu sendiri. Jadi efektivitas ini bukan menilai dari produk akhir melainkan menilai dari proses yang berjalan dalam perencanaan tersebut.

Dengan melihat secara internal kapasitas organisasi dalam artian dalam lingkup pemerintahan itu sendiri, bagaimana kemampuan dalam melakukan perencanaan, apakah sudah sesuai dengan tujuan dari kabupaten itu sendiri ([6], [7], [8], [9]), bagaimana perencanaan itu dilakukan dengan melihat sisi historis kebijakan, peraturan ataupun perencanaan sebelumnya [8], peka terhadap kondisi lingkungan dalam artian keadaan dan arah pembangunan dari wilayah itu sendiri [8], bagaimana sosok kepemimpinan yang turut adil dalam kebijakan perencanaan ([9], [10]), darimana pendanaan berasal ([6], [7], [11]–[13]), bagaimana penempatan individu dalam struktur organisasi yang mendukung perencanaan jalan kabupaten ([10], [12]), bagaimana pemahaman terhadap perencanaan dan latar belakang pendidikan ([9], [10], [12], [14]), bagaimana komunikasi dan koordinasi antar organisasi dalam hal ini antar dinas dan juga masyarakat yang turut andil dalam pengusulannya ([6], [8], [12], [15], [16]), sampai dengan teknologi yang dimanfaatkan dalam perumusan atau penyusunan perencanaan tersebut ([6], [8], [12], [15]). Dengan mengetahui kondisi dalam proses perencanaan tersebut, maka dapat diketahui kapasitas perencanaan yang berimplikasi pada keefektifan dari perencanaan yang dihasilkan tersebut untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Penelitian sebelumnya terkait kapasitas atau kemampuan suatu organisasi dalam pelaksanaan pembangunan seperti yang dilakukan oleh [17] tentang Identifikasi Kebijakan dalam Pembiayaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Dalam Kota Sungailiat di Kabupaten Bangka. Penelitian ini didasari oleh pengelolaan dan pembiayaan pekerjaan pemeliharaan ditentukan pula oleh organisasi atau kelembagaan yang khusus menangani jenis-jenis pemeliharaan tertentu, dalam hal ini termasuk belum adanya kebijakan pemerintah daerah secara khusus dalam penanganan pemeliharaan jalan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam penentuan prioritas pemeliharaan ruas jalan teridentifikasi adanya campur tangan yang kuat dari pihak legislatif dalam penentuan hasil akhir program penanganan meskipun sudah memasukkan usulan dari hasil Musrenbang.

Penelitian sebelumnya terkait dengan penilaian efektivitas adalah penelitian yang dilakukan oleh [18]. Meskipun menggunakan efektivitas, akan tetapi sebenarnya unsur penilaian kapasitas lembaga secara tidak langsung juga dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan adalah menilai efektivitas dari perencanaan yang dilakukan pada satu lembaga yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan yang menggunakan 2 (dua) faktor penilaian yaitu sumber daya manusia dan koordinasi. Ketidakefektivan terletak pada sumber daya manusia yang terdapat pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Asahan, sehingga masukan dalam penelitian ini adalah melakukan peningkatan sumber daya manusia dengan mengikutkan pelatihan, diklat atau pendidikan tugas belajar yang diharapkan dapat merubah sumber daya manusia yang terdapat pada instansi tersebut.

Namun demikian, dari penelitian yang sudah dilakukan, masih sedikit yang meneliti tentang kapasitas perencanaan suatu organisasi dalam hal ini pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan penanganan jalan. Sudah banyak dilakukan penelitian mengenai penilaian kapasitas lembaga, institusi dalam lingkup pemerintah, akan tetapi masih sedikit penelitian yang membahas tentang kapasitas perencanaan dari program penanganan jalan kabupaten dalam hubungannya dengan pengembangan wilayah.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengukur tingkat kapasitas perencanaan pada proses perencanaan program penanganan jalan kabupaten yang telah dilaksanakan dalam mendukung pengembangan wilayah di Kabupaten Pacitan. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai wawasan terhadap pemahaman teori, konsep maupun praktik perencanaan penanganan jalan kabupaten dalam mendukung pengembangan wilayah.

## B. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deduktif kualitatif, dengan unit amatan adalah wilayah Kabupaten Pacitan dengan fokus pada status ruas jalan kabupaten diluar wilayah perkotaan Pacitan yang berada di Kabupaten Pacitan dalam hal perencanaan penanganannya yang memiliki 102 ruas jalan dengan panjang 722,058 km. Sedangkan untuk unit analisisnya adalah keterkaitan perencanaan penanganan jalan dengan pengembangan wilayah yang ada di Kabupaten Pacitan.

Perolehan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam terhadap setiap responden yang telah

ditentukan sebelumnya berdasarkan pemilihan responden secara *purposive sampling* dan dengan pengumpulan data sekunder. Responden yang dipilih berasal dari dinas-dinas yang terkait dengan proses perencanaan penanganan jalan. Secara keseluruhan dari responden yang dipilih, terdapat enam responden dengan rincian tiga responden berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Pacitan, tiga responden berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Pacitan.



**Gambar 1.** Peta Administrasi Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur  
(Sumber : Bappeda Kabupaten Pacitan, 2019)

Keabsahan data diperoleh dengan melakukan triangulasi dimana triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai macam teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada [19]. Senada dengan itu triangulasi merupakan teknik dalam memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain [20]. Triangulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi sumber dengan menggunakan wawancara mendalam pada data yang sama terhadap responden yang berbeda. Selain itu juga dengan memanfaatkan wawancara mendalam disertai dengan sumber data yang lain seperti dengan data sekunder berupa dokumen-dokumen maupun peraturan yang berkaitan dengan tema.

Penggunaan variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan [19]. Pada penelitian ini, terdapat 9 (sembilan) variabel yang digunakan, yaitu:

**Tabel 1.**

**Variabel, indikator dan parameter dalam penelitian**

| Variabel           | Indikator   | Parameter  |
|--------------------|---|--|
| Tujuan Program     | Identifikasi tujuan program penanganan jalan kabupaten      | <b>Kapasitas tinggi</b> jika perencanaan yang dilakukan sesuai dengan tujuan program pembangunan, <b>kapasitas sedang</b> jika perencanaan sesuai dengan tujuan program pembangunan tetapi ada perencanaan diluar tujuan pembangunan, <b>kapasitas rendah</b> jika tidak mengacu pada tujuan pembangunan.  |
| Tinjauan Kebijakan | Dokumen, peraturan, kebijakan terkait pengembangan wilayah. | <b>Kapasitas tinggi</b> jika mengakomodir dan menggunakan dokumen, peraturan, kebijakan terkait pengembangan wilayah, <b>kapasitas sedang</b> jika hanya sedikit saja menggunakan dokumen, peraturan, kebijakan terkait pengembangan wilayah dan <b>kapasitas rendah</b> jika tidak menggunakan dokumen, peraturan, kebijakan terkait pengembangan wilayah |

| Variabel   | Indikator   | Parameter  |
|--|---|--|
| Kondisi Lingkungan   | Keseimbangan perencanaan antara prioritas dan azas pemerataan                                       | <b>Kapasitas tinggi</b> jika perencanaan seimbang antara prioritas daerah dan pemerataan pembangunan, <b>kapasitas sedang</b> jika perencanaan hanya mengakomodir prioritas daerah, <b>kapasitas rendah</b> jika perencanaan hanya mengakomodir pemerataan pembangunan   |
| Kepemimpinan   | Karakteristik pimpinan  | <b>Kapasitas tinggi</b> jika pemimpin memiliki karakteristik tegas, komunikatif, koordinatif, dan mengorganisir sumber daya dengan baik, <b>kapasitas sedang</b> jika memiliki karakteristik yang normatif, <b>kapasitas rendah</b> jika memiliki karakter yang tidak tegas, tidak komunikatif, tidak mampu dalam mengkoordinir, cenderung otoriter  |
| Sumber daya finansial  | Kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan   | <b>Kapasitas tinggi</b> jika sumber keuangan dalam penanganan jalan kabupaten fleksibel, tidak kaku dan berasal dari berbagai sumber, <b>kapasitas sedang</b> jika sumber keuangan terbatas tetapi masih jelas perolehannya, <b>kapasitas rendah</b> jika sumber keuangan hanya mengandalkan pendanaan dari daerah saja dan sumber lain tidak jelas.   |
| Struktur organisasi  | Kesesuaian jabatan dengan latar belakang pendidikan yang terlibat dalam perencanaan jalan kabupaten | <b>Kapasitas tinggi</b> jika jabatan dan latar belakang pendidikan ada kesesuaian dan memiliki pengalaman dalam perencanaan jalan kabupaten >5 tahun, <b>kapasitas sedang</b> jika jabatan dan latar belakang pendidikan tidak sesuai akan tetapi memiliki pengalaman dalam perencanaan jalan kabupaten > 5 tahun, <b>kapasitas rendah</b> jika jabatan dan latar belakang pendidikan tidak sesuai dan penagalaman dalam perencanaan jalan kabupaten < 5 tahun   |
| Pemahaman terhadap perencanaan dan latar belakang pendidikan | Pemahaman konsep perencanaan dikaitkan dengan wilayah dan latar belakang pendidikannya              | <b>kapasitas tinggi</b> jika minimal master (S2) dengan pengalaman >5tahun, <b>kapasitas sedang</b> minimal sarjana (s1) dengan pengalaman >5 tahun, <b>kapasitas rendah</b> jika minimal sarjana (s1) atau dibawahnya dengan pengalaman <5 tahun  |
| Komunikasi dan Koordinasi                                    | Kemudahan koordinasi dan komunikasi   | <b>Kapasitas tinggi</b> jika komunikasi dan koordinasi bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan berkesinambungan, <b>kapasitas sedang</b> jika hanya diwaktu-waktu tertentu saja dan kaku, <b>kapasitas rendah</b> jika sangat jarang atau tidak dilakukan komunikasi dan koordinasi.   |
| Teknologi  | Penggunaan teknologi dalam tahap perencanaan  | <b>Kapasitas tinggi</b> jika memanfaatkan teknologi baik teknologi informasi atau teknologi lainnya dalam proses perencanaan dan digunakan secara optimal dalam pemanfaatannya, <b>kapasitas sedang</b> jika memanfaatkan teknologi baik teknologi informasi atau teknologi lainnya dalam proses perencanaan akan tetapi penggunaan belum optimal dalam pemanfaatannya, <b>kapasitas rendah</b> jika tidak memanfaatkan teknologi baik teknologi informasi atau teknologi lainnya dalam proses perencanaan |

Sumber: Analisis Penulis, 2019-2020

Analisa data yang dilakukan secara deskriptif terhadap semua variabel yang digunakan berdasarkan dari wawancara mendalam dari setiap responden yang telah dilakukan pengklasifikasian terhadap semua informasi beserta verifikasi dengan data-data sekunder yang berkaitan dengan variabel penelitian. Penilaian bertingkat pada setiap variabel digunakan pada tahap akhir untuk memperoleh tingkat kapasitas perencanaannya. Klasifikasi yang digunakan adalah kapasitas tinggi, kapasitas sedang, dan kapasitas rendah dengan tingkatan penilaian hasil akhir tersebut dibuat dengan kriteria tinggi jika nilai secara keseluruhan 67-100%, sedang jika nilai secara keseluruhan 34-66%, rendah jika nilai secara keseluruhan 0-33%.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan variabel dan indikator yang telah ditentukan sebelumnya, dalam analisis yang dilakukan terkait penilaian kapasitas perencanaan penanganan jalan kabupaten dilakukan interpretasi penilaian dari wawancara yang dilakukan. Hasil dari interpretasi kemudian dilakukan penilaian dengan menggunakan skala likert untuk dapat menghasilkan suatu penilaian terhadap kapasitas perencanaan tersebut.

Dari hasil penelitian, kapasitas perencanaan penanganan jalan kabupaten dalam mendukung pengembangan wilayah di Kabupaten Pacitan yaitu 83%. Kapasitas perencanaan dengan penilaian sedang terletak pada kepemimpinan, sumberdaya finansial, dan variabel

teknologi dimana variabel yang lain dinilai memiliki kapasitas perencanaan tinggi.

#### 1. Tujuan Progam

Setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki visi dan misi dalam pembangunan daerahnya yang dimiliki oleh setiap kepala daerah yang terpilih untuk lima tahun kedepan. Visi yang telah ditetapkan ini akan memberikan gambaran terhadap arah daerah yang ingin dicapai dalam masa terpilihnya kepala daerah tersebut. Kemudian dengan memiliki arah pandang kedepan maka juga ditetapkan upaya-upaya untuk mencapainya dengan menetapkan misi.

Melihat dari Visi dari Kabupaten Pacitan periode 2016-2021 ini secara garis besar adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dikaitkan dengan penanganan jalan kabupaten maka upaya yang dilakukan adalah sesuai dengan misi yang ketiga yang berbunyi :

*“Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.” (RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021)*

Tertulis pada misi tersebut, bahwa tujuannya yaitu dengan membangun perekonomian yang diharapkan dengan perekonomian yang maju akan mampu menggerakkan wilayah dan membuat potensi daerah bisa termanfaatkan dengan optimal dengan didukung oleh infrastruktur yang baik yang kesemuanya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan hal ini,



sebagian besar pendapat dari responden memberikan jawaban yang kurang lebih sama bahwa tujuan yang ingin dicapai kesemuanya itu adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai khususnya infrastruktur jaringan jalan.

## 2. Tinjauan Kebijakan

Dalam merencanakan penanganan jalan kabupaten, selain melihat evaluasi dan kondisi tahun lalu juga dokumen-dokumen perencanaan seperti perencanaan kawasan atau perencanaan tematik juga menjadi masukan dalam perencanaan seperti agropolitan, minapolitan, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, potensi-potensi dari wilayah. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten merupakan dokumen utama dalam dasar perencanaan yang dilakukan karena dalam RPJMD memuat tentang arah pembangunan oleh kepala daerah terpilih. Salah satu pernyataan responden seperti berikut,

*"Menginduk kepada RPJMD sebagai pondasi awal tetapi belum mengatur secara ruang baru sebatas sektoral yang masih perlu guidance secara spasial. Dokumen RTRW juga dibutuhkan, dokumen rinci pada setiap kawasan seperti Masterplan, Dokumen Agropolitan juga dibutuhkan dalam perencanaan yang dilakukan"* (AM, ASN di Bappeda, September 2019)

Dengan pernyataan tersebut dimana secara keseluruhan menyetujui bahwa perencanaan yang dilakukan mengacu pada RPJMD sebagai induk perencanaan tahunan dan juga mengacu pada RKPD dimana dimuat dalam dokumen tahunan tersebut arah pembangunan tahun berikutnya dalam perencanaan yang dibuat. Pada RKPD Kabupaten Pacitan 2020 menetapkan bahwa prioritas pembangunan diarahkan pada kawasan wisata dan pertanian, sehingga semua perencanaan pembangunan juga diprioritaskan terhadap dua kawasan tersebut dengan tidak mengesampingkan asas pemerataan.

## 3. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan merupakan variabel yang diartikan bagaimana perencanaan tersebut menghasilkan rencana yang sesuai dengan kondisi wilayah terkait anggaran dalam artian bagaimana dengan kondisi anggaran terbatas pada kabupaten tersebut bisa mengakomodir usulan-usulan penanganan jalan kabupaten seoptimal mungkin. Penilaian dalam variabel ini, apakah rencana penanganan jalan yang dihasilkan sesuai dengan prioritas kabupaten pada tahun anggaran yang direncanakan dan apakah juga menghasilkan rencana penanganan jalan untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.

Dalam penanganan jalan, hal yang utama yang diperhatikan adalah prioritas kabupaten akan tetapi juga tidak mengesampingkan pemerataan pembangunan, hal ini terkait dengan pembangunan pada satu wilayah secara keseluruhan sehingga tidak menimbulkan kesenjangan pembangunan. Pada awalnya pemrioritasan memang membuat beberapa wilayah "cemburu" karena tidak mendapatkan porsi penanganan jalan yang banyak. Pemahaman, sosialisasi dan pendekatan secara persuasif akan turut membantu kelancaran proses pembangunan di Kabupaten Wilayah. Responden dari Bappeda juga menguatkan terkait hal ini :

*"Selain kita menangani prioritas itu, prioritas kabupaten, pemerataan pembangunan tidak kita*

*kesampingkan, tetep kita tangani tapi dengan porsi yang memang kalau prioritas kita porsikan lebih daripada yang memang pemerataan, kalau ada jalan yang rusak di wilayah-wilayah utara, barat, itu tetep kita tangani dengan tanpa mengesampingkan yang rusak itu. Prioritas kita utamakan, yang rusak-rusak yang lain itu kita tetep tangani."* (BR, ASN di Bappeda Pacitan, September 2019)

Hal senada juga dikatakan oleh responden dari Dinas PUPR, dimana perencanaan yang dilakukan tidak hanya pada tema prioritas pembangunan saja yang tertuang dalam RKPD tahun berjalan, akan tetapi juga memperhatikan pembangunan secara merata. Berikut pernyataan yang disampaikan:

*"[...] pemerataan itukan kita itu...satu itu penting tapi jangan dianggap yang lain tidak penting, satu misalnya...barat selatan..penting tapi yang lain juga penting, karena yang kita layani bukan hanya mereka yang hanya area wisata saja, tapi mereka yang berjualan, mereka yang sekolah, mereka yang kerja itu juga diperhatikan."* (SP, ASN di PUPR Pacitan, September 2019)

Melihat pernyataan yang disampaikan, Kabupaten Pacitan telah melakukan perencanaan sampai pelaksanaan dengan tetap fokus pada prioritas kabupaten tanpa mengesampingkan pemerataan pembangunan di wilayah lain diluar wilayah prioritas. Hal ini tentu saja merupakan suatu perencanaan yang bisa dikatakan efektif karena seimbang dan adil dalam melaksanakan pembangunan terutama penanganan jalan kabupaten.

## 4. Kepemimpinan

Dibutuhkannya karakter kepemimpinan yang tegas, komunikatif, koordinatif, dan mengorganisir sumber daya dengan baik yang mengoptimalkan perencanaan pembangunan sampai tahap implementasi dan hasil yang diharapkan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa karakter pemimpin akan berpengaruh juga terhadap kinerja pegawai dibawahnya yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tupoksi yang dibebankan kepada setiap individu tersebut..

Dalam wawancara yang dilakukan terungkap secara tidak langsung bahwa ada kekurangan yang dirasakan pada faktor kepemimpinan pada Kabupaten Pacitan yang berpengaruh terhadap seluruh proses pembangunan yang ada, seperti terlihat dalam pernyataan salah satu responden berikut ini :

*"[...] tidak optimalnya perencanaan secara menyeluruh menurut saya karena pada faktor kepemimpinan, saya ambil contoh dari Banyuwangi, mereka berhasil karena karakter dari pemimpin daerahnya. Diperlukan ketegasan dan inovasi dari pucuk pimpinan untuk dapat melaksanakan program, perencanaan sampai implementasi untuk berjalan dengan baik"* (SP, ASN di PUPR Pacitan, 2020)

Berjalannya kepemimpinan secara normatif, dirasa masih belum cukup untuk dapat mengoptimalkan pembangunan yang ada. Karena dibutuhkan terobosan-terobosan yang inovatif dari segala sektor dalam mendukung pembangunan yang ada baik dari perencanaan, implementasi sampai hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan pemerintah daerah.

## 5. Sumberdaya Finansial

Sumberdaya finansial juga merupakan faktor penting dalam sebuah pembangunan. Perencanaan yang dibuat akan gagal jika tidak ada dukungan finansial. Pada saat ini dimana era otonomi daerah mulai

diberlakukan sejak tahun 1999 melalui Undang-Undang No 22 Tahun 1999, kewenangan dalam mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakat setempat dipegang oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu oleh pemerintah daerah itu sendiri. Sumber pendanaan dalam melaksanakan pembangunan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) kemudian berasal dari pendapatan lain-lain yang sah seperti dana bagi hasil pajak, dana hibah, bantuan keuangan provinsi atau yang lain, dan juga dana darurat seperti dana kebencanaan.

Pemrioritasan penanganan jalan disini mutlak untuk dilaksanakan, mengingat keterbatasan sumber pendanaan yang ada dan juga untuk tetap bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan politis dari yang sudah ditetapkan sebelumnya. Prioritas penanganan jalan dilaksanakan tidak lepas karena kemampuan yang terbatas, sehingga perlu dilakukan urutan atau pentahapan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan khususnya jalan kabupaten. Akan tetapi kembali lagi juga kepada kesejahteraan masyarakat yang mana wilayah Kabupaten Pacitan yang cukup luas dengan panjang jalan kabupaten yang sangat panjang jika dibandingkan dengan anggaran yang ada tidak akan bisa ditangani secara keseluruhan, maka azas pemerataan atau azas keadilan juga harus bisa seimbang.

## 6. Struktur Organisasi

Struktur organisasi disini merupakan ketepatan individu dalam menduduki jabatan yang diberikan dengan latar belakang pendidikannya yang terlibat dalam perencanaan penanganan jalan kabupaten di Kabupaten Pacitan. Karena dengan melihat ketepatan ini, maka secara kapasitas organisasi akan tinggi karena memiliki sumber daya manusia yang optimal dalam jabatannya.

Pada instansi Bappeda secara struktur organisasi yang terlibat dalam perencanaan penanganan jalan kabupaten adalah dari kepala badan; bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur dengan satu sub bidang; dan bidang analisis data, perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan tiga sub bidang. Dari tujuh bagian yang terlibat dalam perencanaan penanganan jalan kabupaten di instansi Bappeda, ada beberapa ketidaktepatan sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Ketidaksesuaian terletak pada dua sub bidang dalam bidang analisis data, perencanaan dan pengendalian pembangunan yang memiliki latar belakang pendidikan s1 pada ilmu sosial, akan tetapi kesemuanya telah terlibat dalam perencanaan secara umum dan berjalan lebih dari 5 tahun.

Pada Dinas PUPR secara struktur organisasi yang terlibat dalam perencanaan jalan kabupaten dari kepala dinas; sekretaris; kasubag program evaluasi dan pelaporan; bidang binamarga dengan tiga sub bidang. Ada total tujuh unit jabatan yang terlibat. Secara keseluruhan, pada Dinas PUPR jabatan dengan latar belakang pendidikan telah sesuai karena memiliki latar belakang S1 Teknik Sipil, meskipun pada S2 ada berbagai macam seperti Master Managemen, Master Teknik (sipil). Ada dua kasubid pada bidang binamarga yang latar belakang pendidikan masih S1. Terdapat satu kasubid yang baru menempati jabatan pada bidang

binamarga yang memiliki latar belakang s1 teknik sipil akan tetapi masih kurang dari 5 tahun dalam keterlibatan pada perencanaan jalan kabupaten.

## 7. Pemahaman terhadap perencanaan dan latar belakang pendidikan

Bahwa sumber daya manusia yang terlibat dari sisi teknokratis dari kedua perangkat daerah yaitu Bappeda dan PUPR telah memenuhi syarat dalam artian memahami apa yang mereka rencanakan, meskipun hanya sebagian kecil saja yang pemahaman terhadap wilayah dalam artian potensi wilayah juga merupakan bagian dari dasar dalam penentuan lokasi penanganan jalan.

Latar belakang pada setiap individu yang terlibat dalam perencanaan juga sebagian besar sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Beberapa individu yang memiliki jabatan pada kedua instansi hanya memiliki ijazah S1, akan tetapi telah memiliki pengalaman dalam perencanaan lebih dari 5 tahun.

Pendapat responden berikut mengungkapkan bahwa pada kantor Bappeda Pacitan secara sumberdaya manusia telah efektif dalam memahami perencanaan :

- 1) *"[...]kalau secara SDM saya kira sudah mumpuni untuk memahami perencanaan secara umum." (BR, ASN di Bappeda Pacitan, September 2019)*
- 2) *"Sebenarnya tinggal...kalau di Bappeda, internal bappeda pemahaman itu sudah clear....dalam artian SDM dan sebagainya..." (AM, ASN di Bappeda Pacitan, September 2019)*

Pada Dinas PUPR yang terlibat dalam perencanaan penanganan jalan juga secara garis besar, sumberdaya manusianya sudah memahami, seperti pendapat responden berikut :

*"Jadi pada dasarnya kita Insya Allah sudah jalan, SDM kita sudah istilahnya kalau untuk tugas itu sudah bisa...secara ilmu pengetahuan sudah memadai...akan tetapi secara jumlah, ini yang belum memadai....artinya dengan ilmunya temen-temen ini sudah bisa mengatasi itu." (SP, ASN di PUPR Pacitan, September 2019)*

Dalam perencanaan, sumberdaya manusia yang terlibat secara langsung harus benar-benar mengerti makna perencanaan yang dilakukan untuk pembangunan karena dalam urusan publik, semua memiliki tujuan akhir untuk kesejahteraan masyarakat. Yang menjadi perhatian yaitu dari masyarakat dan aparatur diwilayah seperti kecamatan dan desa, dimana harus terus disosialisasikan dan diberikan pemahaman terkait ruas jalan dan wilayah yang memang saling terkait dan berhubungan yang tidak bisa dipisahkan.

## 8. Komunikasi dan Koordinasi

Variabel ini dalam perencanaan sangatlah penting untuk dilakukan, karena perencanaan akan melibatkan banyak orang, instansi, stakeholder untuk memberikan gagasan, ide dan masukan terhadap perencanaan. Komunikasi yang lancar akan memberikan hasil yang dapat diterima semua pihak. Begitupun dengan koordinasi yang dilakukan, semakin intens koordinasi yang dilakukan maka akan semakin diterima oleh semua elemen masyarakat.

Rangkaian perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di kabupaten, komunikasi dan koordinasi yang dilakukan terdiri dari beberapa bagian terkait sumber masukan yang digunakan dalam usulan perencanaan yang pertama proses perencanaan secara politis, proses perencanaan teknokratis, proses perencanaan partisipatif, proses perencanaan top-down,

dan proses perencanaan bottom-up. Keterpaduan proses perencanaan dari politis, teknokratis sampai partisipatif haruslah bersinergi dan seimbang, sehingga perencanaan yang dihasilkan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan sesuai dengan kepentingan kabupaten.

Ketidaksinkronan dalam kaitannya komunikasi dan koordinasi sering terjadi antara teknokratis dan masyarakat seperti yang terjadi dan dinyatakan oleh salah satu responden dari PUPR :

*“Kendala memang banyak ketidaksinkronan, karena masyarakat kadang mikirnya parsial, dia tidak mikir kewilayahannya yang dipikirkannya mereka adalah hanya kawasan didaerahnya sendiri, dalam batasan desanya sendiri..karena ada prioritas dari OPD secara keseluruhan kabupaten. sehingga sering kendala, ada miss disini” (MS, ASN di PUPR Pacitan, September 2019)*

Selain dengan masyarakat, koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat atau provinsi juga sangat diperlukan, hal ini untuk menjaga pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah juga sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pusat. Hal ini, kabupaten juga memiliki keuntungan dalam pembangunan daerahnya karena anggaran yang masuk juga bisa didapatkan dan didukung dari pusat jika bertepatan dengan lokasi yang direncanakan sesuai perencanaan yang akan dikembangkan oleh pusat. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu responden dari Bappeda :

*“[...]KSPN itu kan karena kita punya jargon itu yang bisa nggantol pusat, jadi kan nanti match antara perencanaan pusat dan kita. lha nanti pusat mbangun apa, kita mbangun apa kan pembangunan kawasan itu jelas akan bermanfaat [...]” (CR, ASN di Bappeda Pacitan, September 2019)*

Untuk dapat menyeimbangkan perencanaan baik dari sisi politis, teknokratis dan partisipatif peran Bappeda cukup penting dalam menjembatani ketiga metode pengusulan ini. Dibutuhkan kemampuan dan kecermatan agar semua elemen yang terkait puas terhadap hasil yang direncanakan, hal ini seperti dinyatakan oleh responden dari Bappeda :

*“[...]joke konsisten, akan tetapi tinggal gerusan dari mungkin yang politik, kepentingan...itu yang harus benar-bener...bukan berarti politik itu tidak boleh, perencanaan itu ya politik, akan tetapi itu harus sinkron dan konsisten sampai kelar. Bahwa kepentingan wilayah, kepentingan Mbah Suto di wilayah, kepentingan rakyat di wilayah itu harus diakomodir dari politik, diakomodir dari teknokratis ditengahnya Bappeda, untuk bagaimana menangani bagaimana politis dan teknokratis itu sejalan untuk kepentingan mbah suto tadi dan semua harus puas. dan saya kira Bappeda idealnya seperti itu.” (AM, ASN di Bappeda, September 2019)*

Dari sisi komunikasi dan koordinasi masih membutuhkan tugas yang besar dikaitkan dengan perencanaan dengan potensi dari wilayah yang ada yang bisa menjadikan prioritas pembangunan terhadap wilayah tersebut. Masyarakat juga harus memahami potensi apa di wilayahnya dan ini menjadi yang menjadikan prioritas. Akan tetapi juga harus dipahami dan disadari serta butuh kerelaan, jika memang desa atau wilayahnya bukan merupakan prioritas utama, karena dalam kasus jalan kabupaten ruas-ruas jalan utama atau poros utama juga tidak semua jalan kabupaten menjadi prioritas, ada kondisi-kondisi dimana ruas jalan tersebut dijadikan prioritas.

## 9. Teknologi

Perkembangan teknologi yang cukup pesat tidak dapat dipungkiri lagi terutama perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat berperan dalam memajukan berbagai sektor dalam kehidupan manusia. Dikaitkan dengan perencanaan pembangunan wilayah, teknologi informasi dan komunikasi selain bermanfaat untuk masyarakat luas dengan kemudahan dalam melakukan akses informasi dan kontrol terhadap proses pembangunan yang ada, dari sisi perencana juga sangat membantu dalam kaitannya memudahkan perencana dalam melakukan input data, urutan proses perencanaan, kesesuaian lokasi perencanaan dengan implementasi, sampai koreksi serta evaluasi dan kontrol dalam perencanaan itu sendiri secara realtime dan dapat dilihat secara utuh pada saat yang bersamaan.

Kebutuhan akan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam ranah perencanaan pembangunan daerah memang tidak dapat dipungkiri, karena dengan adanya kemajuan teknologi tersebut diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan baik dari segi sumberdaya dan waktu. Perangkat SIPPD ini sangat diperlukan dalam perencanaan pada era saat ini dimana teknologi infrastruktur jaringan komunikasi sudah mulai merambah sampai ke pelosok desa, meskipun memang ada beberapa titik blankspot yang menjadikan kendala dalam pemanfaatan teknologi ini. Hal ini juga diungkapkan oleh responden dari Bappeda :

*“[...]sehingga Bappeda harus menciptakan tools seperti sekarang ada SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) yang memasukkan usulan dari bawah sampai nanti kepenganggaran itu terintegrasi, itu sudah membantu tetapi sekali lagi begitu usulan dari bawah hanya ruas itu tidak penuh terus Bappeda harus bisa membalance bahwa diusulan itu jalan itu harus lebih banyak, tidak hanya kalau OPD malah enak ini, ini saja jalannya pendek...seperti itu, sehingga kembali lagi pemahaman itu terus dilakukan dengan SIPPD ini harus berbasis spasial, hanya memuaskan sesaat jika hanya dikerjakan tidak menyeluruh. Tetapi belum dihitung bahwa jalan ini berfungsi optimal nggak, apa hanya ditangani ya ditangani akan tetapi tidak ada fungsinya” (AM, ASN di Bappeda Pacitan, 2019)*

Pernyataan diatas juga disampaikan bahwa dalam SIPPD yang dikembangkan haruslah juga memiliki basis spasial juga dalam penentuan lokasi. Hal ini juga dimaksudkan dalam pengusulan dari masyarakat, teknokratik maupun politis konsisten sampai dengan implementasinya. Untuk saat ini lokasi secara spasial masih belum disematkan dalam SIPPD ini, sehingga masih dimungkinkan lokasi yang dimaksud, yang direncanakan bisa bergeser pada saat implementasinya, hal ini yang harus segera ditangani mengingat perencanaan pembangunan merupakan kepentingan masyarakat secara luas.

Dalam hasil wawancara terkait teknologi ini, memang semua menyatakan membutuhkan dan penting jika terintegrasinya sistem informasi antara SIPPD dengan sistem informasi penganggaran dan bahkan pencatatan aset. Tidak kalah pentingnya dari itu juga mengenai perkembangan teknologi yang berkaitan dengan data spasial yaitu GPS (*Global Positioning System*) dimana teknologi tersebut minimal sudah disematkan dalam gawai smartphone yang tentu saja akan sangat memudahkan dalam menandai lokasi pengusulan. Sistem SIPPD yang ada memang perlu

segera dibenahi terkait dengan data spasial dan integrasi dengan sistem perencanaan yang lain. Pengembangan dalam kaitannya dengan teknologi tidak akan berhenti dan akan terus selau mengalami pembenahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang diharapkan dan memberikan kemudahan dalam perencanaan.

#### 10. Kapasitas Perencanaan Penanganan Jalan Kabupaten

Interpretasi yang dilakukan terhadap data hasil wawancara mendapatkan serangkaian penilaian kapasitas perencanaan terhadap hasil interpretasi pada masing-masing variabel. Hasil interpretasi tersebut menghasilkan penilaian kapasitas yang bisa dinyatakan dengan prosentase untuk bisa dinyatakan penilaian

kapasitas secara keseluruhan terhadap perencanaan penanganan jalan yang ada di Kabupaten Pacitan jika dikaitkan dengan pengembangan wilayah. Penilaian kapasitas perencanaan dinyatakan dengan menggunakan data ordinal dengan menggunakan pendekatan skala angka. Dengan menggunakan skala 1 sampai 5 dimana untuk nilai kapasitas tinggi jika mendekati nilai 5 dan sebaliknya kapasitas rendah mendekati nilai 1.

Tabel 2.

Penilaian Efektivitas Perencanaan Penanganan Jalan Kabupaten di Kabupaten Pacitan

| No | Variabel Penilaian  | Responden |    |    |    |    |    | Nilai     |              | Nilai | Kapasitas |
|----|---|-----------|----|----|----|----|----|-----------|--------------|-------|-----------|
|    |   | R1        | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total     | Persentase   |       |           |
| 1  | Tujuan Program  | 5         | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 30        | 100          | 5     | T         |
| 2  | Tinjauan Kebijakan  | 5         | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 30        | 100          | 5     | T         |
| 3  | Kondisi Lingkungan  | 5         | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 30        | 100          | 5     | T         |
| 4  | Kepemimpinan  | 3         | 5  | 3  | 3  | 3  | 5  | 22        | 66,7         | 3     | S         |
| 5  | Sumberdaya Finansial  | 3         | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 18        | 60           | 3     | S         |
| 6  | Struktur organisasi<br>Pemahaman terhadap<br>perencanaan dan latar<br>belakang pendidikan | 5         | 3  | 3  | 5  | 5  | 5  | 26        | 86,7<br>86,7 | 5     | T         |
| 7  | Koordinasi dan Komunikasi   | 5         | 5  | 3  | 5  | 3  | 5  | 26        | 86,7         | 5     | T         |
| 9  | Teknologi   | 3         | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 18        | 60           | 3     | S         |
|    |   |           |    |    |    |    |    | Jumlah    | 746,7        |       |           |
|    |   |           |    |    |    |    |    | Rata-rata | 83           | 4,33  | T         |

Sumber : Analisis Penulis, 2020

Ket : Kapasitas Tinggi (T) : 5 (> 67-100 %)

Kapasitas Sedang (S) : 3 (> 34 - < 67 %)

Kapasitas Rendah (R) : 1 (< 34 %)

Kapasitas perencanaan penanganan jalan kabupaten di Kabupaten Pacitan secara keseluruhan memiliki nilai akhir 83% dimana nilai tersebut memiliki arti bahwa kapasitas perencanaan dalam penanganan jalan kabupaten tinggi. Belum mencapai nilai maksimal yaitu 100% disebabkan dari tiga variabel penilaian yaitu kepemimpinan, sumberdaya finansial, dan variabel teknologi. Ketiga variabel tersebut memiliki nilai kurang dari 67% sehingga masuk dalam penilaian kapasitas sedang. Untuk variabel penilaian yang lainnya seperti tujuan program, tinjauan kebijakan, kondisi lingkungan, struktur organisasi, pemahaman perencanaan dan latar belakang pendidikan, serta koordinasi dan komunikasi memiliki penilaian kapasitas tinggi dalam perencanaan yang dilakukan meskipun pada variabel struktur organisasi, pemahaman perencanaan dan latar belakang pendidikan serta variabel koordinasi dan komunikasi nilainya masih kurang dari 100% atau lebih tepatnya 86,7%.

#### D. DISKUSI

Penilaian kapasitas perencanaan yang telah dilakukan dengan hasil 83% memang merupakan hasil yang sudah baik dalam hal perencanaan. Kekurangan pada variabel kepemimpinan, sumberdaya finansial, dan variabel teknologi memang menjadi catatan bagi

Kabupaten Pacitan untuk dapat meningkatkan kekurangan yang ada.

Faktor kepemimpinan dalam penilaian kapasitas ini tertuju pada kepemimpinan kepala daerah. Karakteristik kepemimpinan yang normatif, masih dianggap belum bisa membantu dalam meningkatkan keefektifan pembangunan daerah yang ada khususnya pada penanganan jalan kabupaten. Inkonsistensi pada karakteristik normatif ini masih tidak mampu untuk menyelaraskan antara perencanaan teknokratik dan pendekatan politik yang ada, sehingga seringkali perencanaan teknokratis dan partisipatifpun akhirnya bisa tersingkirkan oleh pendekatan secara politis. Kemampuan menyelaraskan kepentingan politik dengan teknokratis dan partisipatif merupakan sosok kepemimpinan yang akan mampu membawa daerah untuk bisa maju dalam pembangunan.

Penilaian kapasitas perencanaan sedang pada variabel sumberdaya finansial disebabkan sangat bergantungnya anggaran pembangunan di Kabupaten Pacitan dari transfer dana pusat. Jika dilihat dari porsi APBD yang ada di Kabupaten Pacitan, pada tahun 2018 porsi APBD secara berurutan dengan komposisi PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah 10,35%; 65,44%; 24,2%. Memang masih sangat terpaut cukup jauh sekitar 55% antara PAD dengan dana perimbangan. Untuk pendanaan CSR dan



model pembiayaan KPBU, Kabupaten Pacitan masih sangat sulit untuk mendapatkan peluang tersebut. Untuk daerah jika dilihat dari segi transportasi dimana Kabupaten Pacitan merupakan tujuan akhir untuk mobilitas baik penumpang ataupun barang dan bukan merupakan daerah yang dijadikan daerah singgah, sehingga masih sangat sulit untuk meningkatkan ketertarikan para investor terhadap Kabupaten Pacitan. Diperlukan strategi yang jitu dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pacitan dalam menarik investor. Pariwisata yang saat ini merupakan sektor yang paling diunggulkan oleh Kabupaten Pacitan dalam meningkatkan PAD merupakan peluang yang cukup bagus untuk dikelola dan dikemas dengan baik sehingga akan menarik minat para investor untuk menanamkan investasi di Kabupaten Pacitan.

Dari semua penilaian variabel yang telah dilakukan, terdapat temuan yang bisa sangat berpengaruh terhadap semua hasil perencanaan. Temuan yang terkait perencanaan di Kabupaten Pacitan yang bisa mengganggu atau mengurangi keefektifan perencanaan yang dilakukan sesuai kapasitasnya adalah ketidakpahaman terkait data perencanaan yang digunakan dalam perencanaan tidak hanya dari sisi sektoral akan tetapi juga **spasial** dari *top manager* sampai *grass root* yang berakibat terhambatnya dalam keefektifan perencanaan pembangunan terutama pada penanganan jalan kabupaten.

## E. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dituliskan sebelumnya, kapasitas perencanaan jalan kabupaten dalam mendukung pengembangan wilayah di Kabupaten Pacitan tinggi dengan nilai 83%. Dengan asumsi semakin tinggi kapasitas perencanaan maka akan semakin efektif perencanaan yang dilakukan, sehingga kelemahan terdapat pada kepemimpinan, sumberdaya finansial dan teknologi perlu menjadi perhatian yang lebih dalam pengembangan kapasitas. Karena kepemimpinan sebagai *top manager* mampu memiliki kewenangan dalam kebijakan yang ada, pembangunan akan membutuhkan finansial yang jelas sedangkan teknologi mengalami perkembangan secara terus menerus sehingga perlu dilakukan penyesuaian secara berkala. Koordinasi dan komunikasi antar dinas, antar perencana, dengan stakeholder dan dengan masyarakat terus dijaga dan ditingkatkan, karena dalam perencanaan koordinasi dan komunikasi mutlak untuk dilakukan dan harus dilakukan. Pemahaman akan kewilayahan dikaitkan dengan penanganan jalan ataupun sektor lainnya mutlak harus dimiliki oleh perencana, sehingga perencanaan yang dihasilkan tidak mengabaikan kondisi wilayah yang dimiliki. Kesadaran akan pentingnya data spasial dalam perencanaan yang masih sering dianggap sebelah mata oleh pimpinan organisasi, pimpinan daerah dan bahkan beberapa perencana akan mengakibatkan hasil perencanaan yang tidak terarah untuk itu sumberdaya manusia dan teknologi yang mendukung terkait data spasial haruslah digunakan dan diaplikasikan dalam proses perencanaan secara optimal.

Pada penelitian kapasitas perencanaan yang dilakukan ini, maka untuk mendapatkan detail kejelasan setiap variabel terkait masalah yang dialami dalam hal perencanaan, maka peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan metode

penelitian yang lebih mendalam dan rinci terkait variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga akan bisa mendapatkan inti permasalahan dalam setiap kekurangan yang dihasilkan dalam perencanaan pembangunan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih, peneliti ucapkan kepada Pusbindiklatren Kementerian PPN/BAPPENAS yang telah memberikan kesempatan beasiswa pada jenjang Strata 2. Tidak lupa juga peneliti mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Kabupaten Pacitan khususnya kepada Bappeda dan Dinas PUPR Kabupaten Pacitan yang telah banyak membantu dalam penelitian ini dan juga kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan penelitian kepada peneliti sehingga terselesaikannya penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- [1] Hariyanto and Tukidi, "Konsep Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Indonesia di Era Otonomi Daerah," *J. Geogr. Media Inf. Pengemb. dan Profesi*, vol. 4 (1), pp. 1-10, 2007.
- [2] S. A. Adisasmita, *Transportasi dan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- [3] R. Adisasmita, *Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori*, 2nd ed. Yogyakarta: Expert, 2018.
- [4] D. Kartikasari, "Analisis Jaringan Jalan dan Arahan Prioritas Penanganannya di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah," Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2017.
- [5] R. G. Dyson and M. J. Foster, "Effectiveness in strategic planning," *Eur. J. Oper. Res.*, vol. 5, no. 3, pp. 163-170, 1980.
- [6] T. K. PKP2A III LAN Samarinda, "Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan," *Borneo Adm.*, vol. 6 No 1, 2010.
- [7] Kunarjo, *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, 3rd ed. Jakarta: UI-Press, 1996.
- [8] D. Sujarto, *Pengantar Planologi*. Bandung: Penerbit ITB, 2011.
- [9] P. Morgan, "Capacity and Capacity Development - Some Strategies," 1998.
- [10] H. R. R. Soeprapto, "Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance," in *Workshop Reformasi Birokrasi*, 2006.
- [11] C. G. Loh, "Four potential disconnects in the community planning process," *J. Plan. Educ. Res.*, vol. 32, no. 1, pp. 33-47, 2012.
- [12] M. E. Grindle, M.S & Hilderbrand, "Building sustainable capacity in the public sector : what can be done ?," *Public Adm. Dev.*, vol. 15, pp. 441-463, 1995.
- [13] D. K. Cohen, S. W. Raudenbush, and D. L. Ball, "Resources , Instruction , and Research," *Educ. Eval. Policy Anal.*, vol. 25, no. 2, pp. 119-142, 2003.
- [14] S. D. Brody, "Measuring the Effects of Stakeholder Participation on the Quality of Local Plans Based on the Principles of Collaborative Ecosystem Management," *J. Plan. Educ. Res.*, vol. 22, pp. 407-419, 2003.
- [15] D. Eade, *Capacity-Building An Approach to People-Centred Development*. Oxford: Oxfam (UK and Ireland), 1997.
- [16] R. A. Febrian, "Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis)," *Wedana J. Kaji. Pemerintahan, Polit. dan Birokrasi*, vol. 1 (1), pp. 41-49, 2015.
- [17] A. Alie, "Identifikasi Kebijakan dalam Pembiayaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Dalam Kota Sungailiat di Kabupaten Bangka," Universitas Diponegoro, 2006.
- [18] I. Harahap, "Efektivitas Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan," Universitas

Sumatera Utara, 2012.

- [19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 3rd ed. Bandung: CV ALFABETA, 2017.
- [20] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 36th ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.